



FORMULASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DI PROVINSI BANTEN

¹Delly Maulana, ²Bambang Pujiyono, ³Rudi Subiyakto

¹Program Studi Administrasi Negara, Universitas Serang Raya, Banten Indonesia

²Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Budi Luhur, Jakarta Indonesia

³Magister Administrasi Publik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Kepulauan Riau Indonesia

¹delly_maulana@yahoo.com, ²bambang.pujiono@budiluhur.ac.id,

³rudisubiyaktodap2015@gmail.com

ABSTRACT

To increase economic growth and have an impact on society, one of which is through tourism development. Indeed, tourism in Banten Province has very good potential, both from coastal, mountain, religious, and cultural tourism. For example, Banten Province is one of the areas designated as the Tanjung Lesung Special Economic Zone. But now this area is no longer a strategic program of the Central Government. Apart from that, Banten also has religious tourism in the Old Banten area which has become a pilgrimage destination. Banten also has cultural and natural tourism, namely traditional Baduy tourism which has quite an interesting appeal for tourists who want to learn about the characteristics of the typical Baduy people. Therefore, with very good potential, it is necessary to have a comprehensive policy formulation so that this potential can develop significantly while at the same time providing maximum impact on increasing local revenue in each Regency/City in the Banten Province region and providing local community welfare. The method used in this study is a qualitative method using primary and secondary data and using data analysis techniques with the help of Atlas Ti software (looking for potential, problem identification, and policy alternatives) and Process Hierarchy Analysis (AHP) to find recommendations that are prioritized and most the best to be the solution for tourism development in Banten Province. This research will provide an overview of the potential and policy formulation for tourism development in Banten Province.

Keywords; Policy Formulation, Tourism Development, Local Own Revenue, and Community Welfare

A. PENDAHULUAN

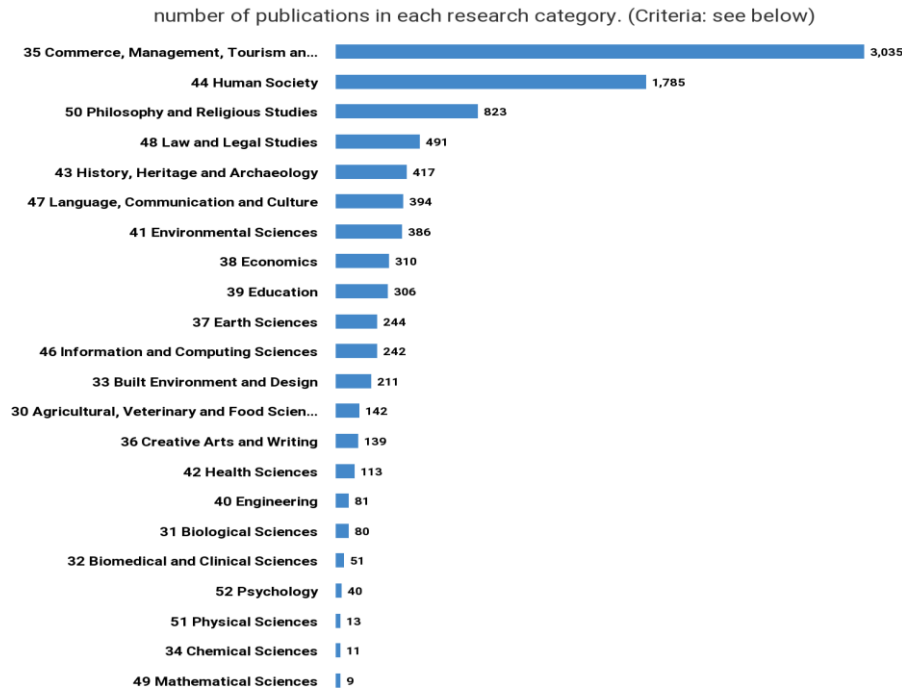
Sejatinya pengembangan pariwisata akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan sekaligus membarikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan bagi pemerintah dan masyarakat. Dalam pembangunan sosial, pengembangan sektor pariwisata juga dapat mengatasi persoalan sosial ekonomi, seperti pengangguran, ketimpangan, dan kemiskinan dengan memberikan peluang dan nilai sosial bagi masyarakat (Aguinis et al., 2023). Pengembangan pariwisata harus mengedepankan aspek keberlanjutan dan daya saing dalam pengelolaannya

sehingga dapat merespon dan adaptif terhadap perubahan (Peters & Ku, 2023; Suno et al., 2021). Krisis sektor ekonomi pariwisata akibat dampak Covid-19 yang lalu akibat penutupan dan pembatasan (transportasi dan akomodasi) orang yang berkonsekuensi terhadap ambruknya sektor pariwisata nasional, khususnya Provinsi Banten termasuk sektor usaha kecil dan menengah yang sangat bergantung pada sektor ini (Weng et al., 2022).

Secara faktual, wisata di Provinsi Banten memiliki potensi yang sangat baik, baik dari wisata pesisir, pegunungan, religus, dan wisata budaya. Misalnya, Provinsi Banten merupakan salah satu daerah yang dijadikan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung. Namun saat ini kawasan ini tidak lagi menjadi program strategis Pemerintah Pusat. Selain itu, Banten juga memiliki wisata religus di daerah Banten Lama yang menjadi destinasi wisata zairah. Banten juga memiliki wisata budaya dan alam, yakni wisata adat baduy yang memiliki daya tarik yang cukup menarik bagi wisatawan yang ingin mempelajari karakteristik masyarakat Baduy yang khas. Data dari Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2022, wisatawan lokal, domestik, dan mancanegara yang berwisata di Provinsi Banten sekitar 61 juta. Dari jumlah tersebut yang berwisata dengan mengunjungi objek wisata ada sekitar 19,9 juta wisatawan dan sisanya, sekitar 41,1 juta wisatawan melakukan wisata kuliner dan wisata belanja. Kemudian, pada tahun 2022 Provinsi Banten memiliki sekitar 1.088 destinasi wisata dari 8 (Delapan) Kabupaten/Kota (Banten, 2023; News, 2023).

Selanjutnya dari hasil pemetaan riset terkait isu formulasi kebijakan pengembangan pariwisata dengan menggunakan data dimensions dengan kata kunci kebijakan pariwisata dari tahun 2014-2023 menunjukkan beberapa isu, yakni : persoalan komersialisasi wisata, persoalan pelayanan pariwisata, persoalan pengembangan pariwisata, persoalan kebijakan dan komitmen politik, persoalan pemberdayaan masyarakat sadar wisata, persoalan pembangunan berkelanjutan dan lingkungan (Degradasi Lingkungan dan Konflik Tata ruang), persoalan sejarah dan budaya, dan yang terakhir adalah persoalan aktor-aktor dalam kebijakan pariwisata. Hal ini terlihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 1. Isu-isu Pariwisata



Source: <https://app.dimensions.ai>
Exported: May 15, 2023
Criteria: 'kebijakan pariwisata' in full data.

© 2023 Digital Science and Research Solutions Inc. All rights reserved. Non-commercial redistribution / external re-use of this work is permitted subject to appropriate acknowledgement. This work is sourced from Dimensions® at www.dimensions.ai.

(Sumber : Hasil Pencarain di Portal Dimensions Tahun 2023)

Dengan kondisi tersebut maka perlu ada formulasi kebijakan yang strategis untuk menciptakan kebijakan pariwisata yang berkelanjutan dengan melibatkan semua aktor yang berkepentingan dalam kebijakan ini agar potensi tersebut bisa berkembang secara signifikan, sekaligus dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di masing-masing Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi Banten, sekaligus memberikan dampak kesejahteraan masyarakat lokal.

B. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder serta menggunakan teknik analisis data dengan bantuan software Atlas Ti (mencari potensi, identifikasi masalah, dan alternatif kebijakan) dan Analisis Hirarki Proses (AHP) untuk mencari rekomendasi yang prioritas dan paling terbaik untuk menjadi solusi pengembangan pariwisata di Provinsi Banten.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Aktor-aktor yang Terlibat dalam Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Provinsi Banten

Dalam mengidentifikasi aktor yang terlibat dalam kebijakan pengembangan pariwisata di Provinsi Banten, maka perlu melakukan analisis aktor. Menurut Ondee dan Pannarunothai (Anderson, 2003; Bryson et al., 2011; Lawrence, 2017; Maulana & Yulianti, 2022; Ondee & Pannarunothai, 2008; Rafika et al., 2016; Yuningsih et al., 2019) analisis aktor adalah metode sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis sebuah data dari kepentingan aktor (individu, kelompok dan organisasi) dalam rangka mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat dalam kebijakan ini, baik aktor utama dalam sebuah sistem pengelolaan, menilai kepentingan dari beberapa aktor masing-masing (pertaruhan), serta memprediksi potensi yang berpengaruh pada formulasi kebijakan pengembangan pariwisata di Provinsi Banten. Sebab secara konseptual pariwisata adalah industri yang multidimensi dan lintas sektoral. Oleh karena itu, keterlibatan semua pihak dibutuhkan, karena pariwisata bukan sektor yang berdiri sendiri sehingga harus mempertimbangkan keterkaitan antar sektor (Suardana, 2016).

Dari hasil pemetaan aktor yang terlibat dalam formulasi kebijakan pengembangan pariwisata adalah para Kepala Daerah, baik Gubernur, Bupati, dan Walikota di wilayah Provinsi Banten, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bappeda Provinsi dan Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Dinas Perhubungan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Dinas PUPR Provinsi dan Kabupaten/Kota, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Banten dan Kota Serang, TNI/Polisi, Pelaku Usaha Mikro dan Menengah, Pokdarwis, tokoh masyarakat, pengusaha, LSM yang bergerak pada Lingkungan Hidup, Media massa, Perguruan Tinggi, dan masyarakat wisata.

Dari hasil wawancara, dokumentasi dan observasi peneliti maka terlihat identifikasi aktor-aktor yang terlibat dalam formulasi kebijakan pengembangan pariwisata di Provinsi Banten.:

Tabel 1.

**Identifikasi Aktor-aktor yang Terlibat dalam Formulasi Kebijakan
Pengembangan Pariwisata di Provinsi Banten**

No	Aktor	Peran dan Kewenangan	Kekuasaan, Pengaruh dan Kepentingan
1.	Gubernur dan Bupati/Walikota	Memiliki peran yang signifikan dan merumuskan kebijakan untuk mengembangkan sector pariwisata di wilayah Provinsi Banten	Memiliki kekuasaan, pengaruh, dan kepentingan yang tinggi
2.	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Memiliki peran yang signifikan dalam merumuskan kebijakan atau program untuk pengembangan pariwisata di Provinsi Banten	Memiliki kekuasaan, pengaruh, dan kepentingan yang tinggi
3.	DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota	Memiliki peran yang signifikan dalam merumuskan kebijakan atau program untuk pengembangan sector pariwisata di Provinsi Banten	Memiliki kekuasaan yang sedang, memiliki kepentingan yang tinggi dan pengaruh yang tinggi
4.	Dinas Pariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota	Memiliki kewenangan dalam memberikan masukan kepada kepala daerah dan membuat program-program pengembangan destinasi wisata di wilayah Provinsi Banten	Memiliki kekuasaan yang sedang, memiliki kepentingan yang tinggi dan pengaruh yang tinggi
5.	Bappeda Provinsi dan Kabupaten/Kota	Berperan dalam perencanaan untuk bisa memprioritaskan pengembangan pariwisata di Provinsi Banten	Memiliki kekuasaan yang sedang, pengaruh, dan kepentingan yang tinggi
6.	Dinas PUPR Provinsi dan Kabupaten/Kota	Berperan dalam merumuskan kebijakan untuk memfasilitasi sarana dan prasana dalam pengembangan pariwisata di Provinsi Banten	Memiliki kekuasaan yang sedang, pengaruh, dan kepentingan yang tinggi
7.	Media Massa	Merupakan aktor non formal yang memiliki kekuatan dalam mempengaruhi pemerintah dalam memprioritaskan program	Memiliki kekuasaan yang sedang, pengaruh yang tinggi dan kepentingan yang cukup

No	Aktor	Peran dan Kewenangan	Kekuasaan, Pengaruh dan Kepentingan
		pengembangan pariwisata di Provinsi Banten	
8.	Badan Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota	Memiliki kewenangan dalam memberikan masukan kepada kepala daerah agar program-program pengembangan peningkatan destinasi wisata di wilayah Provinsi Banten agar mengedepankan aspek-aspek kualitas lingkungan.	Memiliki kekuasaan yang sedang, memiliki kepentingan yang tinggi dan pengaruh yang tinggi
9.	LSM yang Bergerak pada Lingkungan Hidup	Lembaga yang bisa memberikan masukan kepada kepala daerah dan pemerintah agar program-program pengembangan pariwisata di provinsi Banten dengan mengedepankan aspek-aspek kualitas lingkungan, seperti tidak merusak tatanan lingkungan (menjaga keberadaan pohon mangrove dan menggalakan penanaman mangrove, memberikan pendidikan kepada nelayan tentang penangkapan ikan yang sadar lingkungan, dan lain-lain).	Memiliki kekuasaan yang sedang, pengaruh yang tinggi dan kepentingan yang cukup
10.	Pokdarwis	Berperan sebagai ujung tombak pengembangan wisata di level terbawah	Memiliki kekuasaan yang rendah, kepentingan yang tinggi, dan pengaruh yang sedang
11.	Dinas Perhubungan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Penyedia akses transportasi dalam memfasilitasi pengembangan pariwisata di Provinsi Banten	Memiliki kekuasaan sedang, pengaruh yang tinggi dan kepentingan yang tinggi
12.	Pengusaha Wisata	Memiliki peran untuk membantu pemerintah dalam pengembangan pariwisata di Provinsi Banten	Memiliki kekuasaan, pengaruh dan kepentingan yang tinggi sebagai aktor informal

No	Aktor	Peran dan Kewenangan	Kekuasaan, Pengaruh dan Kepentingan
13.	Polisi/TNI	Memiliki kewenangan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Provinsi Banten	Memiliki kekuasaan, kepentingan, dan pengaruh dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah wisata di Provinsi Banten
14.	Perguruan Tinggi	Memiliki peran yang signifikan dalam mempengaruhi dan memberikan masukan dalam pengembangan pariwisata di Provinsi Banten	Memiliki kekuasaan yang sedang, pengaruh dan kepentingan yang tinggi dalam pengembangan pariwisata di Provinsi Banten sebagai aktor informal
15.	Tokoh masyarakat	Memiliki peran yang signifikan dalam mempengaruhi dan memberikan masukan dalam pengembangan pariwisata di Provinsi Banten	Memiliki kekuasaan yang sedang, pengaruh dan kepentingan yang tinggi dalam pengembangan pariwisata di Provinsi Banten sebagai aktor informal
16.	Masyarakat Wisata	Memiliki kepentingan yang tinggi untuk bisa mendapatkan pendapatan ekonomi	Memiliki kekuasaan yang rendah, kepentingan yang tinggi, dan pengaruh yang rendah. Oleh karena itu, perlu ada komunitas yang bisa menjaga dan mendukung keberadaannya agar mereka memiliki kekuatan dan pengaruh yang cukup dalam mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata di Provinsi Banten

(Sumber: Hasil Penelitian, 2023)

Formulasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Provinsi Banten

Dalam konteks formulasi kebijakan pariwisata maka proses ini adalah suatu proses untuk memilih alternatif yang paling terbaik. Oleh karena itu, secara prosesnya perlu untuk menerapkan kriteria atau standar yang rasional, sehingga kebijakan yang akan direkomendasikan dari alternatif kebijakan tersebut diharapkan paling baik dan efektif untuk diajukan kepada *policy makers*. Patton dan Sawicki dalam Keban (Maulana & Nugroho, 2019) mengemukakan ada beberapa kriteria penting yang biasa digunakan untuk memilih alternatif kebijakan, yakni : *Pertama*, harus layak secara

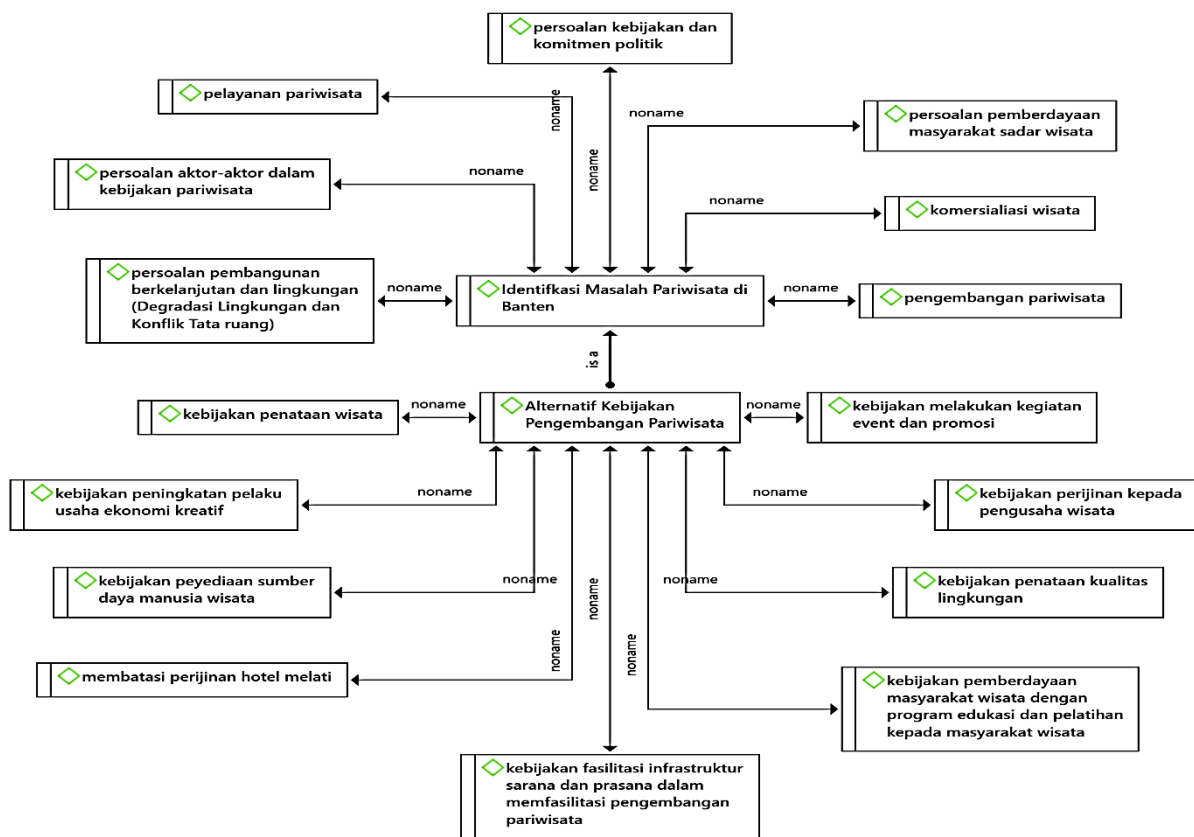
teknis (*Technical Feasibility*). Harus menciptakan efektivitas atau mampu menyelesaikan masalah; *Kedua*, mengedepankan kelangsungan politik (*Political Viability*). Apakah suatu kebijakan tersebut dapat diterima oleh aktor-aktor politik, para klien dan aktor-aktor lainnya. Apakah sudah mengedepan responsivitas serta tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku; *Ketiga*, Kemungkinan bisa layak secara ekonomi dan keuangan (*Economic and Financial Possibility*), yakni mengedepankan efisiensi dan bisa mampu dijalankan secara pembiayaan; dan yang *Keempat*, mampu dijalankan secara administrasi (*Administrative Operability*), yakni apakah kebijakan tersebut mampu dijalankan secara administratif.

Kebijakan pariwisata merupakan suatu produk dari proses yang sangat kompleks karena terkait dari berbagai aspek. Kompleksitas kebijakan pariwisata disebabkan adanya perubahan, baik dalam skala lokal, nasional, maupun global (Suardana, 2016). Oleh karena itu perlu ada kebijakan yang komprehensif dan keberlanjutan dalam pengembangan pariwisata di Provinsi Banten. Dari hasil wawancara dan FGD memberikan gambaran bahwa dalam pengembangan pariwisata harus mengedepankan keberlanjutan. Peran aktor yang berkepentingan dalam memberikan masukan dalam rangka pengembangan pariwisata di Provinsi Banten merupakan faktor penting dalam proses formulasi kebijakan sehingga kebijakan yang akan diputuskan dan diimplementasikan dalam rangka pengembangan pariwisata di Provinsi Banten merupakan kebijakan yang terbaik dengan mengedepankan aspek *Technical Feasibility*, *Political Viability*, *Economic and Financial Possibility*, dan *Administrative Operability*.

Adapun alternatif-alternatif kebijakan dalam pengembangan pariwisata di Provinsi Banten, adalah sebagai berikut : *Pertama*, kebijakan fasilitasi infrastruktur sarana dan prasana dalam memfasilitasi pengembangan pariwisata di Provinsi Banten; *Kedua*, kebijakan pemberdayaan masyarakat wisata dengan program edukasi dan pelatihan kepada masyarakat wisata agar masyarakat menjadi masyarakat sadar wisata; *Ketiga*, kebijakan perijinan kepada pengusaha wisata untuk menginvestasikan modalnya dalam rangka pengembangan wisata di Provinsi Banten; *Keempat*, kebijakan penataan wisata di wilayah Provinsi Banten; *Kelima*, kebijakan penataan kualitas lingkungan di wilayah wisata, termasuk menjaga objek wisata agar tetap alami; *Keenam*, kebijakan melakukan kegiatan event dan promosi untuk mengopinikan pariwisata di Provinsi Banten; *Ketujuh*, kebijakan peyediaan sumber daya manusia wisata yang profesional, bekerjasama dengan pihak lembaga

pendidikan dan pelaku usaha wisata; *Kedelapan*, kebijakan peningkatan pelaku usaha ekonomi kreatif melalui beberapa program pengembangan, seperti permodalan, peningkatan kreatifitas, dan pendampingan; dan *Kesembilan*, membatasi perijinan hotel melati agar *homestay-homestay* masyarakat bisa berkembang sehingga memberikan pendapatan bagi masyarakat sekitar wisata. Gambaran eksisiting dari hasil pengolahan data Atlas TI menunjukkan bahwa ada beberapa isu dari hasil identifikasi permasalahan pengembangan pariwisata di Banten serta beberapa alternatif kebijakan untuk bisa mengembangkan pariwisata di Provinsi Banten, yakni sebagai berikut:

Gambar 1.
Hasil Pengolahan Data Atlas TI



(Sumber : Hasil Pengelohan Data Atlas TI 9, 2023)

Selanjutnya, untuk mencari rekomendasi kebijakan yang paling prioritas dan terbaik untuk menjadi solusi pengembangan pariwisata di Provinsi Banten dengan bantuan Software Analisis Hirarki Proses (AHP) adalah sebagai berikut :

Gambar 2.

Hasil Pengolahan data Menggunakan Analisis Hirarki Proses (AHP)

Resulting Priorities

Priorities

These are the resulting weights for the criteria based on your pairwise comparisons:

Cat		Priority	Rank	(+)	(-)
1	Fasilitasi infrastruktur	13.4%	3	7.3%	7.3%
2	Pemberdayaan masyarakat wisata	4.4%	8	2.3%	2.3%
3	Perijinan kepada pengusaha wisata	9.4%	5	3.5%	3.5%
4	Penataan wisata	18.0%	2	6.9%	6.9%
5	Penataan kualitas lingkungan	8.0%	6	3.7%	3.7%
6	Melakukan kegiatan event dan promosi	25.2%	1	16.1%	16.1%
7	Penyediaan SDM wisata	7.1%	7	3.3%	3.3%
8	Peningkatan pelaku usaha ekonomi kreatif	12.7%	4	7.4%	7.4%
9	Peningkatan pelaku usaha homestay	1.8%	9	1.1%	1.1%

Number of comparisons = 36
Consistency Ratio CR = 9.6%

Decision Matrix

The resulting weights are based on the principal eigenvector of the decision matrix:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	7.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00
2	0.14	1	0.50	0.25	1.00	0.14	1.00	0.14	5.00
3	1.00	2.00	1	1.00	1.00	0.20	1.00	1.00	7.00
4	1.00	4.00	1.00	1	4.00	1.00	4.00	2.00	7.00
5	1.00	1.00	1.00	0.25	1	0.12	2.00	1.00	6.00
6	1.00	7.00	5.00	1.00	8.00	1	5.00	1.00	5.00
7	1.00	1.00	1.00	0.25	0.50	0.20	1	1.00	6.00
8	1.00	7.00	1.00	0.50	1.00	1.00	1.00	1	7.00
9	0.17	0.20	0.14	0.14	0.17	0.20	0.17	0.14	1

Principal eigen value = 10.115
Eigenvector solution: 6 iterations, delta = 2.0E-8

(Sumber : Hasil Software AHP, 2023)

Dari hasil pengolahan data dengan menggunakan software AHP menunjukkan bahwa ada kebijakan yang sangat prioritas yang harus dilakukan dalam rangka pengembangan pariwisata di Provinsi Banten, yakni : *Pertama*, kebijakan melakukan kegiatan event dan promosi untuk mengopinikan pariwisata di Provinsi Banten; *Kedua*, kebijakan penataan wisata di wilayah Provinsi Banten; *Ketiga*, kebijakan fasilitasi infrastruktur sarana dan prasana dalam memfasilitasi pengembangan pariwisata di Provinsi Banten; *Keempat*, kebijakan peningkatan pelaku usaha ekonomi kreatif melalui beberapa program pengembangan, seperti permodalan, peningkatan kreatifitas, dan pendampingan; *Kelima*, kebijakan perijinan kepada pengusaha wisata untuk menginvestasikan modalnya dalam rangka pengembangan wisata di Provinsi Banten; *Keenam*, kebijakan penataan kualitas lingkungan di wilayah wisata, termasuk menjaga objek wisata agar tetap alami; *Ketujuh*, kebijakan peyediaan sumber daya manusia wisata yang professional, bekerjasama dengan pihak lembaga pendidikan dan pelaku usaha wisata; *Kedelapan*, kebijakan pemberdayaan masyarakat wisata dengan program edukasi dan pelatihan kepada masyarakat wisata agar masyarakat menjadi masyarakat sadar wisata; *Kesembilan*, membatasi perijinan hotel melati agar *homestay-homestay* masyarakat bisa berkembang sehingga memberikan pendapatan bagi masyarakat sekitar wisata.

SIMPULAN

Sejatinya sektor pariwisata menjadi salah satu andalan di Provinsi Banten untuk dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah sekaligus memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat daerah. Namun, untuk meralisasikan hal tersebut perlu adalah formulasi kebijakan yang berkelanjutan untuk dapat mengembangkan sektor pariwisata dengan melibatkan aktor-aktor yang berkepentingan. Sebab, secara konseptual, kebijakan pariwisata merupakan suatu produk dari proses yang sangat kompleks.

Oleh karena itu, perlu ada kebijakan yang sangat prioritas yang harus dilakukan dalam rangka pengembangan pariwisata di Provinsi Banten, yakni melakukan kegiatan event dan promosi untuk mengopinikan pariwisata di Provinsi Banten, penataan wisata di wilayah Provinsi Banten, serta membangun fasilitas infrastruktur sarana dan prasana dalam memfasilitasi pengembangan pariwisata di Provinsi Banten agar sektor wisata bisa memberikan kontribusi pendapatan asli daerah sekaligus mensejahterakan masyarakat Banten.

DAFTAR PUSTAKA

- Aguinis, H., Kraus, S., Po, J., Meyer, N., & Jensen, H. (2023). *The why , how , and what of public policy implications of tourism and hospitality research*. 97(August 2022). <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2023.104720>
- Anderson, J. E. (2003). *Public Policymaking*. Houghton Mifflin Company.
- Banten, P. P. (2023). *Tingkatkan Kunjungan Wisatawan, Pemprov Banten Tata 1.200 Destinasi Wisata*. 8–10. <https://bantenprov.go.id/pressrelease/tingkatkan-kunjungan-wisatawan-pemprov-banten-tata-1200-destinasi-wisata>
- Bryson, J. M., Quinn, M., & Bowman, R. A. (2011). Working with evaluation stakeholders: A rationale , step-wise approach and toolkit. *Evaluation and Program Planning*, 34(1), 1–12. <https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2010.07.001>
- Lawrence, A. T. (2017). The drivers of stakeholder engagement: Reflections on the case of Royal Dutch/Shell. *Unfolding Stakeholder Thinking*. <https://doi.org/10.4324/9781351281881-10>
- Maulana, D., & Nugroho, A. (2019). *KEBIJAKAN PUBLIK (Cara Mudah Memahami Kebijakan Publik)*. CV. AA. Rizky.
- Maulana, D., & Yulianti, R. (2022). Multi-Actor Collaboration in Improving the Economy

of the Fishing Community in Karangantu Coastal Area of Serang, Indonesia. *Journal of Contemporary Governance and Public Policy*, 3(2), 87–100. <https://doi.org/10.46507/jcgp.v3i2.80>

- News, A. (2023). *Kunjungan Wisatawan di Banten Didominasi Wisata Kuliner dan Belanja*. 1–9. <https://www.antaraneews.com/berita/3432417/kunjungan-wisatawan-di-banten-didominasi-wisata-kuliner-dan-belanja>
- Ondee, P., & Pannarunothai, S. (2008). *Stakeholder Analysis : Who are the Key Actors in Establishing and Developing Thai Independent Consumer Organizations ?* 265–275.
- Peters, M., & Ku, K. (2023). *Journal of Destination Marketing & Management Sustainable tourism policies : From crisis-related awareness to agendas towards measures* Sarah Sch o. 27(July 2022). <https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2023.100762>
- Rafika, K., Rym, K., Souad, S. B., & Youcef, L. (2016). *A public actor awareness for sustainable development*. 216(October 2015), 151–162. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.12.022>
- Suardana, I. wayan. (2016). Analisis Kebijakan Pengembangan Pariwisata (Intervensi Melalui Kebijakan Pariwisata Berkelanjutan di Bali). *Seminar Nasional Pariwisata Berkelanjutan, April*, 1–26.
- Suno, J., Barbrook-johnson, P., & Font, X. (2021). Annals of Tourism Research Participatory complexity in tourism policy: Understanding sustainability programmes with participatory systems mapping. *Annals of Tourism Research*, 90, 103269. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2021.103269>
- Weng, J., Wong, C., Ka, I., & Lai, W. (2022). Journal of Hospitality and Tourism Management The mechanism influencing the residents ' support of the government policy for accelerating tourism recovery under COVID-19. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 52(June), 219–227. <https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2022.06.018>
- Yuningsih, T., Darmi, T., & Sulandari, S. (2019). Model Pentahelik Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kota Semarang. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 3(2), 84. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v3n2.p84-93>